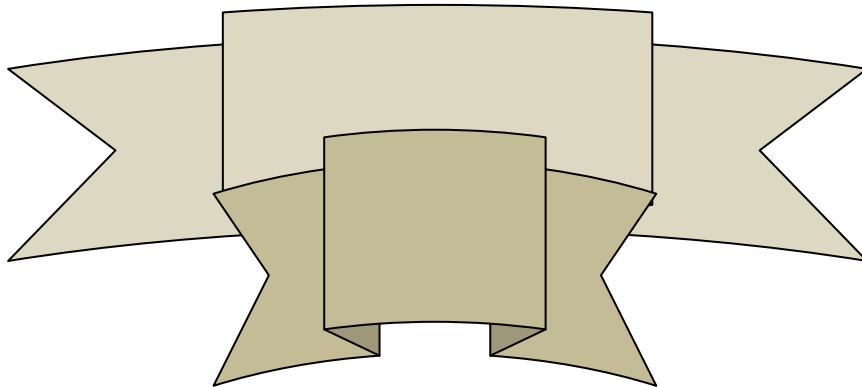




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
BAPELITBANG KABUPATEN ROTE NDAO 2020**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan yang diharapkan tidak hanya pemerintah kepada masyarakat tetapi juga kepada pemberi mandat. Oleh karena itu, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam LKIP ini menggambarkan tentang kinerja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao tahun 2019. Terdapat 11 Program dan 44 kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019. LKIP tidak hanya sekedar alat tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan sehingga senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2019 dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 dengan target kinerja yang akan dicapai.

Adapun pencapaian kinerja sasaran Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>S A S A R A N</b>	<b>RATA- RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>	<b>SKALA ORDINAL</b>
1.	Meningkatnya Sistem Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Dokumen Rencana yang telah ditetapkan secara terintegrasi, sinergis dan harmonis melalui E-Planning	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan lintas sub sektor di daerah melalui rapat koordinasi, asistensi program dan pelaksanaan kegiatan	100	Sangat Berhasil

NO	S A S A R A N	RATA- RATA CAPAIAN KINERJA (%)	SKALA ORDINAL
4.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil musyawarah pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif yang Demokratis	100	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan, Kajian untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao	100	Sangat Berhasil

Walaupun secara keseluruhan capaian kinerja sasaran tercapai dan berhasil namun masih ada kendala-kendala Pembinaan tersebut antara lain menyangkut aspek koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi, sinergitas program/kegiatan antar sektor, manajemen keuangan, aspek kelembagaan, serta konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan. Terhadap kendala-kendala permasalahan yang dihadapi diupayakan dilakukan perbaikan ke depan untuk pencapaian sasaran kinerja yang lebih baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB. I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	2
D. Dasar Hukum.....	6
E. Sistematika Laporan.....	6
BAB. II PERENCANAAN KINERJA .....	7
A. Rencana Strategis Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao	7
1. Pernyataan Visi dan Misi.....	7
2. Penetapan Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	8
B. Perjanjian Kinerja Bapelitbang Tahun 2019.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	15
A. Akuntabilitas Kinerja Bapelitbang Kab. Rote Ndao.....	15
B. Realisasi Anggaran.....	25
BAB IV : P E N U T U P .....	28

## KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai media pertanggung jawaban kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Rote Ndao menyajikan capaian kinerja program dan kegiatan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019, kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam menyajikan informasi kinerja secara lengkap dan sempurna. Untuk itu, semua masukan berupa saran dan kritik konstruktif diperlukan untuk menyempurnakan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Rote Ndao menjadi media informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan menjadi bahan evaluasi kinerja demi pencapaian dan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

Baa, 24 Januari 2020  
Kepala Bapelitbang Kab. Rote Ndao,  
  
Drs. Erengki J. Haning  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750821199412 1006

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah kebutuhan pembangunan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari Pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan Perencanaan Strategis yang telah dirumuskan. Pertanggung-jawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan penilaian akuntabilitas.

Secara umum LAKIP ini bermanfaat untuk : 1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LAKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan; 2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah dan; 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Untuk itu, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao. Dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara detail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao pada masa mendatang.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### 1. Maksud

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao dimaksudkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao selama tahun sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan. Pada setiap akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan, serta capaian kinerjanya dipertanggungjawabkan kepada Pemberi Mandat dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai dengan Renstra yang memuat visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Pemerintah dan Perjanjian Kinerja Tahun Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao.

### 2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah

1. Merupakan sarana eksternal organisasi bagi penerima mandat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemberi mandat dan *stakeholders*.
2. Sebagai sarana internal organisasi dalam evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.
3. Untuk mendorong jajaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

## **C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**

### 1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Daerah, ditetapkan bahwa Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok :

**“Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan”.**

### 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

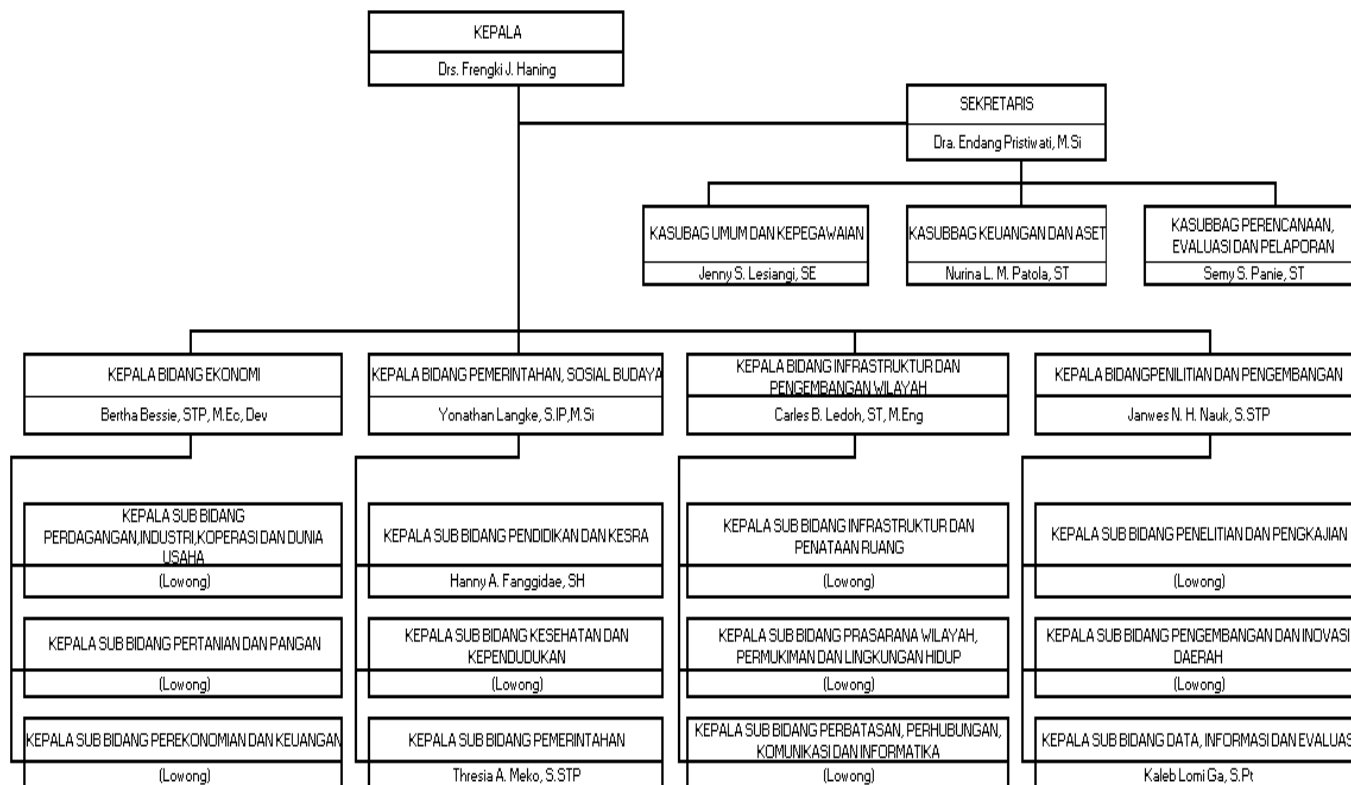
1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Struktur Organisasi

Struktur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu Sekretariat dan 4 Bidang yakni :

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
  - ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - ❖ Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - ❖ Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Bidang Ekonomi terdiri dari :
  - ❖ Sub Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha;
  - ❖ Sub Bidang Pertanian dan Pangan; dan
  - ❖ Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan.
3. Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, terdiri dari :
  - ❖ Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat
  - ❖ Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan; dan
  - ❖ Sub Bidang Pemerintahan
4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
  - ❖ Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang
  - ❖ Sub Bidang Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
  - ❖ Sub Bidang Perbatasan, perhubungan, komunikasi dan informatika.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
  - ❖ Sub Bidang Penelitian dan pengkajian;
  - ❖ Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi Daerah;
  - ❖ Sub Bidang Data, Informasi dan Evaluasi.



**Gambar 1. Struktur organisasi Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019**



Dari struktur di atas dapat dilihat bahwa dari 21 jabatan yang terisi 12 jabatan dan yang lowong 9 Jabatan.

Jumlah Pegawai Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao sebanyak 27 orang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Pegawai yang memiliki jabatan 12 orang dan pelaksana 15 orang. Rincian kepangkatan, Jabatan dan Pendidikan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao**

NO	NAMA/NIP	KEPANGKATAN	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	Drs. Frengki J. Haning 19750821 199412 1 006	Pembina Utama Muda/ IVC	Kepala Bapelitbang	Sarjana
2	Dra. Endang Pristiwati, M.Si 19670412 199203 2 014	Pembina Tk. I / IV.B	Sekretaris Bapelitbang	Pasca Sarjana
3	Yonathan Langke, S.IP, M.Si 19651111 198512 1 003	Pembina / IV A	Kabid Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Pasca Sarjana
4	Bertha Bessie, STP, M.Ec 19690926 199203 2 004	Penata Tk. I / IIID	Kabid. Ekonomi	Pasca Sarjana
5	Janwes N.H. Nauk, SSTP 19850120 200312 1 002	Penata Tk. I / III D	Kabid Penelitian & Pengembangan	Sarjana

NO	NAMA/NIP	KEPANGKATAN	JABATAN	PENDIDIKAN
6	Carles B. Ledoh, ST.M.Eng 19761231 200604 1 048	Penata Tk. I / III D	Kabid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Pasca Sarjana
7	Kaleb Lomi Ga, S.Pt 19711117 200604 1 003	Penata Tk. I / IIID	Kasubid Data, Informasi & Evaluasi	Sarjana
8	Hanny A. Fanggidae, SH 19760428 200604 2 007	Penata Tk. I / IIID	Kasubid Pendidikan & Kesejahteraan Rakyat	Sarjana
9	Nurina L. M. Patola, ST 19800125 200904 2 004	Penata Tk. I / III D	Kasubag. Keuangan dan Aset	Sarjana
10	Semy S. Panie, ST 19820916 201001 1 021	Penata / III C	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sarjana
11	Jenny S. Lesiangi, SE 19790613 201001 2 015	Penata / III C	Kasubag. Umum & Kepegawaian	Sarjana
12	Agustinus Lebo, S.IP,MA 198508312015031002	Penata / III C	Kasubid. Perekonomian & Keuangan	Pasca Sarjana
13	Yon T. A. J. Nge, ST 19790820 200904 1 003	Penata / III C	Staf	Sarjana
14	Paul O. Dethan, ST 19771023 200501 1 011	Penata Muda Tk. I / III B	Staf	Sarjana
15	Dorida Tasilima, A.Md 19780615 200604 2 029	Penata Muda Tk. I / III B	Staf	Diploma III
16	Tezer Rynaldo Ndoen, ST 19830525 201503 1 002	Penata Muda Tk.I / IIIB	Staf	Sarjana
17	Jusuf Ronald Modok, ST 19851231 201503 1 004	Penata Muda Tk.I / IIIB	Staf	Sarjana
18	Yohanes Riberu Esa, SP 19901112 201503 1 002	Penata Muda Tk.I / IIIB	Staf	Sarjana
19	William Daniel Feoh, S.STP 19931115 201507 1 002	Penata Muda Tk.I / IIIB	Staf	Sarjana
20	Onky Michael Katiandagho, S.STP 19940607 201609 1 003	Penata Muda / IIIA	Staf	Sarjana
21	Petty Christine Tampi, S.STP 19941014 201609 2 001	Penata Muda / IIIA	Staf	Sarjana
22	Muhammad Rizki Abdullah Ohorella, S.STP 19951106 201708 1 001	Penata Muda / IIIA	Staf	Sarjana
23	Erasmus P. Sina 19710404 199903 1 008	Pengatur / IIIA	Staf	SMA
24	Jon Lussie 19810505 200701 1 010	Pengatur / IID	Staf	SMA
25	Ester Rohi 19820304 200701 2 006	Pengatur / IID	Staf	SMK
26	Yodi Petrus 19770728 201212 1 003	Pengatur Muda Tk. I/II B	Staf	SMA
27	Dody Alexander Vanche 19801210 201406 1 004	Pengatur Muda Tk. I/II B	Staf	SMA

## **D. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **E. SISTEMATIKA LAPORAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **Ikhtisar Eksekutif**

### **Daftar Isi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum OPD
- D. Tugas Pokok dan Fungsi
- E. Dasar Hukum
- F. Sistematika Laporan

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

- A. Rencana Strategis (Renstra Tahun 2014-2019)
  1. Visi
  2. Misi
- B. Perjanjian Kinerja OPD Tahun

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Akuntabilitas Kinerja OPD
- B. Akuntabilitas Keuangan OPD

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Perencanaan strategis merupakan proses perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan dari masa depan suatu organisasi. Untuk itu dalam rangka mengintegrasikan perencanaan maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 untuk periode lima tahunan.

Rencana Starategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 ini tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah dan didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat ini.

#### **1. Pernyataan Visi dan Misi**

##### **a. Visi**

Visi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Rote Ndao yaitu **“Terwujudnya sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel, dinamis, realistis dan bermartabat”**. Visi ini memiliki fungsi pengarahan dan pengawasan dalam hal kegiatan perencanaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dinamis mengandung arti dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan, perkembangan dan fenomena yang terjadi di masyarakat, sedangkan realistis menggambarkan bahwa perencanaan yang dihasilkan merupakan daftar kebutuhan yang penting, prioritas, terukur serta berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

##### **b. Misi**

Misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan secara terintegrasi, sinergis, konsisten dan harmonis.

2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas sub sektor di daerah.
3. Meningkatkan dan optimalisasi sistem dan prosedur pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan di daerah.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil musyawarah pembangunan daerah.
5. Meningkatkan konsistensi pemanfaatan ruang untuk pembangunan sesuai kaidah-kaidah tata ruang yang dinamis, produktif dan ramah lingkungan.
6. Meningkatkan kajian rencana tata ruang untuk kawasan penyangga pertumbuhan ekonomi baru.
7. Meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur perencana

## **2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

### **a. Tujuan**

Sejalan dengan visi dan misi Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao yang telah ditetapkan maka tujuan yang ingin dicapai Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao adalah :

1. Peningkatan sistem perencanaan pembangunan yang mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan secara terintegrasi, sinergis konsisten dan harmonis.
2. Adanya peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan pembangunan antar sektor dan lintas sub sektor di daerah.
3. Peningkatan dan optimalisasi sistem dan prosedur pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan di daerah.
4. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
5. Peningkatan konsistensi pemanfaatan ruang untuk pembangunan sesuai kaidah-kaidah ruang yang dinamis, produktif dan ramah lingkungan.
6. Peningkatan kajian rencana detail tata ruang untuk kawasan penyangga pertumbuhan ekonomi baru.
7. Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur perencana.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai 5 tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya sistem perencanaan pembangunan yang mengacu pada dokumen rencana yang telah ditetapkan secara terintegrasi, sinergis dan harmonis melalui pengembangan *E-planning*.
2. Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas sub sektor di daerah melalui rapat koordinasi, asistensi program dan pelaksanaan kegiatan.
3. Meningkatnya sistem dan prosedur pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan di daerah melalui pengembangan *e-monev*.
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil musyawarah pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif yang demokratis.
5. Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang untuk pembangunan sesuai kaidah-kaidah ruang yang dinamis, produktif dan ramah lingkungan melalui pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang efektif.
6. Meningkatnya kajian rencana detail tata ruang untuk kawasan penyangga pertumbuhan ekonomi baru melalui penyusunan master plan kawasan dan RDTR Kawasan.
7. Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur perencana melalui Diklat.

c. Strategi

Adapun strategi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao adalah :

1. Pengembangan Sistem perencanaan pembangunan berbasis pada *E-Planning* untuk meningkatkan kualitas perencanaan serta mengurangi inkonsistensi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
2. Peningkatan koordinasi antar pemerintah dalam perencanaan pembangunan melalui penyelarasan program dan kegiatan dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan.
3. Mengembangkan sisten Pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis *E-Monev* untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.

4. Membangun sistem basis data dan informasi pembangunan serta arsip dokumen pendukung perencanaan pembangunan yang valid dan terkini.
5. Peningkatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang bertujuan menyiapkan sumber informasi yang akurat dalam rangka pengawasan dan peningkatan kinerja perencanaan pembangunan.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas asistensi dan evaluasi kebijakan pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang ingin dicapai dalam bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang fisik prasarana.
7. Penyusunan master plan kawasan strategis dan cepat tumbuh guna meningkatkan investasi sektor swasta dan pemerintah.
8. Menyiapkan sumberdaya aparatur perencana yang profesional

d. Kebijakan

Kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao adalah :

- 1 Meningkatkan kualitas perencanaan dengan menerapkan sisten perencanaan *E-Planning*.
- 2 Menerapkan sisten Pengendalian dan Monev pembangunan dengan *E-Monev*.
- 3 Menerapkan asistensi dan koordinasi program dan kegiatan intensif berjenjang dan berkelanjutan.
- 4 Membangun sumber data base pembangunan dan pengarsipan melalui *E-Arsip*.
- 5 Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif, sinergis, responsif dan akuntabel.
- 6 Meningkatkan kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang/kawasan.
- 7 Meningkatkan dan pengembangan aparatur perencana Bapelitbang yang berkualitas, profesional, bersih dan berwibawa.
- 8 Meningkatkan evaluasi hasil perencanaan pembangunan.
- 9 Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan program/kegiatan antar unit.

➤ **Program :**

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pengembangan Data/Informasi
5. Program Kerjasama Pembangunan
6. Program pengembangan Wilayah perbatasan
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program perencanaan Pembangunan Ekonomi
9. Program perencanaan Pembangunan sosial Budaya
10. Program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

#### **6. Kegiatan**

1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
12. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
13. Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah provinsi NTT
14. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
15. Pengadaan Meubelair
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
20. Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Hibah Luar Negeri dan Anggur Merah dan UKP4



21. Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
22. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
23. Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan
24. Penyusunan dan Pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
25. Pendataan Potensi Daerah Perbatasan dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perbatasan
26. Penyusunan Rancangan RPJMD
27. Penetapan RPJMD
28. Penyusunan Rancangan RKPD
29. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
30. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
31. Penyusunan KUA/PPAS Induk/Murni
32. Penyusunan KUA/PPAS Perubahan
33. Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah
34. Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan
35. Penyusunan Indikator Kinerja Utama
36. Pembentukan dan Fasilitasi E-Planning/SIMDA Perencanaan
37. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
38. Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
39. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
40. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
41. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
42. Penyusunan RPI2JM bidang cipta karya
43. Review RTRW dan penyusunan rancangan perda tata ruang

## **B. PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN ROTE NDAO**

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Dengan demikian penetapan kinerja merupakan tekad

dan janji kinerja tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan dan penetapan kinerja yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan OPD yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Penetapan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Sasaran, indikator dan target kinerja**  
**Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Sistem Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Dokumen Rencana yang telah ditetapkan secara terintegrasi, sinergis dan harmonis melalui <i>e-Planning</i>	Jumlah dokumen RKPD, RKPD Perubahan, Renstra Bapelitbang, Indikator Kinerja Utama, RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024, RPI2JM, Rencana Aksi Daerah Perbatasan dan RAD AMPL Kab. Rote Ndao Tahun 2017-2021 yang disusun	8 Dokumen
		Jumlah dokumen data statistik	19 Jenis Buku
		Data Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPD), dan Data Bantuan Masyarakat Miskin	2 Dokumen
		Integrasi Perencanaan Pembangunan daerah dalam e-planning	4 Aplikasi (Simlaras, Krisna DAK, e-musrenbang dan e-Planning SIPD)
2.	Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan lintas sub sektor di daerah melalui rapat koordinasi, asistensi program dan pelaksanaan kegiatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi Bidang Fispra	31 Kali/4 OPD
		Jumlah pelaksanaan koordinasi Bidang Ekonomi	12 Kali/12 OPD
		Jumlah pelaksanaan Rakor dan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sosialisasi SDGS	1 rakor, 1 kali sosialisasi dan 22 Kali koordinasi
		Jumlah pelaksanaan koordinasi Bidang Sosbud	34 Kali/28 OPD
		Jumlah pelaksanaan koordinasi Bidang Litbang	6 Kali

		Jumlah pelaksanaan koordinasi Dana Dekonsentarsi/Tugas Pembantuan	8 Kali
		Jumlah Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	1 Lembaga/NGO
		Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelitbangan	1 Kegiatan/ 1 Dokumen
3.	Meningkatnya Sistem dan Prosedur pengendalian dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan di daerah melalui pengembangan E-Monev	Jumlah Monev hasil perencanaan pembangunan daerah, Monev anggaran merah dan Monev AMPL yang dilaksanakan	4 Kali
		Jumlah Dokumen Evaluasi Renja Perangkat Daerah	4 Dokumen
4.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil musyawarah pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif yang demokratis	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang (Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional)	13 Kali
5.	Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur perencana melalui diklat perencanaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat	6 orang

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban Kepala Bapelitbang atas pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi OPD, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

#### **A. AKUNTABILITAS KINERJA BAPELITBANG KABUPATEN ROTE NDAO**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao didukung oleh Aparatur Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun masyarakat sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao adalah RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019, RKT dan Penetapan Kinerja. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja digunakan metode :

## PENGUKURAN KINERJA

### 1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

**Atau:**

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator keluran dan hasil dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

### 2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$  : Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85\%$  : Berhasil
- $55\% < X < 70\%$  : Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$  : Belum Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 maka dapat jelaskan sebagai berikut :

**SASARAN 1 :**

**Meningkatnya sistem perencanaan pembangunan yang mengacu pada dokumen rencana yang telah ditetapkan secara terintegrasi, sinergis dan harmonis melalui pengembangan *e-planning***

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan Sistem Perencanaan Pembangunan Yang Mengacu Pada Dokumen Rencana Yang Telah Ditetapkan secara terintegrasi, sinergis dan harmonis melalui pengembangan *E-Planning* dengan penyediaan dokumen untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao.

Sasaran ini dicapai melalui :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Rancangan RPJMD dengan anggaran sebesar Rp.457.847.400,- terealisasi sebesar Rp. 456.266.800,- (99,65%).
  - b. Penetapan RPJMD dengan anggaran sebesar Rp. 193.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 192.136.900,- (99,19%).
  - c. Penyusunan Rancangan RKPD dengan anggaran sebesar Rp.225.000.000,- terealisasi sebesar Rp.224.193.000,- (99,64%).
  - d. Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan dengan anggaran sebesar Rp.140.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 120.782.500,- (97,28%).
  - e. Pembentukan dan Fasilitasi E-Planning/ SIMDA Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 242.977.000,- terealisasi sebesar Rp. 236.368.395,- (97,28%).
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Indikator Kinerja Utama dengan anggaran sebesar Rp.90.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 89.932.350,- (99,92%).
  - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 88.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 87.765.000,- (99,73%).

3. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, dengan kegiatan :  
Penyusunan RPI2JM bidang cipta karya, dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 99.895.500,- (99,90%).
4. Program Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, dengan kegiatan :  
Pendataan Potensi Daerah Perbatasan dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perbatasan dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 71.118.100,- (94,82%).
5. Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan kegiatan :  
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 79.960.200,- (99,95%).
6. Program Pengembangan Data/Informasi , dengan kegiatan :  
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunn dokumen perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 197.959.000,- terealisasi sebesar Rp. 187.655.300,- (94,80%).
7. Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan :  
Penyusunan dan pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.110.000.000,- terealisasi sebesar Rp.108.017.000,- (98,20%).
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan :  
Pendataan Bantuan Masyarakat Miskin dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- terealisasi sebesar Rp.74.933.900,- (99,91%).

**Tabel. 2**

**Capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya sistem perencanaan pembangunan yang mengacu pada dokumen rencana yang telah ditetapkan secara terintegrasi, sinergis dan harmonis melalui pengembangan *e-planning***

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	2019		Capaian (%)	Rens tra 2019
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah dokumen RKPD, RKPD Perubahan, Renstra Bapelitbang, Indikator Kinerja Utama, dan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024, RPI2JM, Rencana Aksi Daerah Perbatasan dan RAD AMPL Kab. Rote Ndao Tahun 2017-2021 yang disusun	Dok.	26	8	8	100	30

2	Jumlah dokumen data statistik	Buku	1520	1 Dok. 19 Jenis Buku (170)	1 Dok. 19 Jenis Buku (170)	100	2250
	Data Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPD), dan data bantuan masyarakat miskin	Dok.	10	2	2	100	12
3	Integrasi perencanaan pembangunan daerah dalam e-planning	Aplikasi	4	4 Aplikasi	4 Aplikasi	100	4
Rata-rata						100	

Penjelasan Capaian Indikator Sebagai berikut :

- Dokumen RKPD, RKPD Perubahan, Renstra Bapelitbang, Indikator Kinerja Utama, dan RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2023, RPI2JM, Rencana Aksi Daerah Perbatasan dan RAD AMPL Kab. Rote Ndao Tahun 2017-2021 yang disusun target 8 dokumen terealisasi 8 dokumen (capaian 100%).
- Jumlah Data dan informasi perencanaan pembangunan target 1 Dokumen dan 19 Jenis Buku terealisasi 1 Dokumen dan 19 Jenis Buku (capaian 100%).
- Data Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPD), dan Data Bantuan Masyarakat Miskin yang disusun dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen OPD (capaian 100%).
- Integrasi Perencanaan Pembangunan daerah dalam e-planning dengan target 44 OPD/4 Aplikasi (Simlaras, Krisna DAK, e-musrenbang dan e-Planning SIPD teralisasi 4 Aplikasi (capaian 100%).

Dari 4 (empat) Capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya sistem perencanaan pembangunan yang mengacu pada dokumen rencana yang telah ditetapkan secara terintegrasi, sinergis dan harmonis melalui pengembangan *e-planning* terealisasi 100% dari target yang direncanakan sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Permasalahan dari sasaran ini adalah

- a. Data dan Informasi dari perangkat daerah tidak tepat waktu.
- b. Data indikator kinerja pembangunan daerah yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan tidak ada dalam publikasi data statistik.

Solusinya antara lain :

- a. Lebih pro aktif untuk mengingatkan kembali dan mendatangi perangkat daerah terkait untuk pengambilan data.



- b. Diperbarui kesepakatan kerjasama dengan BPS agar ke depan bisa menyediakan data-data perencanaan pembangunan yang dibutuhkan.

**SASARAN 2 :**

**Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas sub sektor di daerah melalui rapat koordinasi, asistensi program dan pelaksanaan kegiatan**

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan Koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan lintas Sektor dan Lintas Sub Sektor melalui rapat koordinasi, asistensi program dan pelaksanaan kegiatan sehingga terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas program dan kegiatan perencanaan pembangunan. Sasaran ini dicapai melalui :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan Dekonsentrasi, TP, Hibah Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- terealisasi sebesar Rp.70.970.850,- (94,63%).
2. Program Kerjasama Pembangunan , dengan kegiatan :
  - a. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga dengan anggaran sebesar Rp.65.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 64.703.250,- (99,54%).
  - b. Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan anggaran sebesar Rp.95.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 87.111.850,- (91,70%).
  - c. Fasilitasi Kerja Sama Kelitbang dengan anggaran sebesar Rp.233.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 226.769.900,- (97,33%).
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan :
  - a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 112.733.850,- (93,94%).
  - b. Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) dengan anggaran sebesar Rp.280.000.000,- terealisasi sebesar Rp.279.499.450,- (99,82%).
4. Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan Kegiatan :

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dengan anggaran sebesar Rp.280.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 279.499.450,- (99,82%).
5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan Kegiatan :

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana dengan anggaran sebesar Rp.319.650.000,- terealisasi sebesar Rp.318.580.350,- (99,67%).

Tabel. 3

**Capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas sub sektor di daerah melalui rapat koordinasi, asistensi program dan pelaksanaan kegiatan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	2019		Capaian (%)	Rencana 2019
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah pelaksanaan koordinasi Bidang Fispra	Kali/OPD	120	31/4	31/4	100	160
2	Jumlah pelaksanaan koordinasi Bidang Ekonomi	Kali/OPD	48	12/12	12/12	100	60
3	Jumlah pelaksanaan rakor dan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan sosialisasi SDGS	Kali/sosialisasi/koordinasi	4 /1/ 88	1 /1/ 22	1 /1/ 22	100	5 /2/ 88
4	Jumlah pelaksanaan koordinasi Bidang Sosbud	Kali/OPD	128	32/28	32/28	100	160
5	Jumlah pelaksanaan koordinasi Bidang Litbang	Kali	24	6	6	100	30
6	Jumlah pelaksanaan koordinasi dana dekonstruksi/tugas pembantuan	Kali	32	8	8	100	40
7	Jumlah kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	lembaga/ NGO	4	1	1	100	5
8	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelitbangan	Kegiatan/ dokumen	0	1	1	100	2
<b>Rata-rata</b>						<b>100</b>	

Penjelasan Capaian Indikator Sebagai berikut :

- Jumlah pelaksanaan koordinasi litbang, Perbatasan, Bidang Ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, Bidang Sosbud dan Bidang Fispra dengan target 12 bulan/111 kali terealisasi target 12 bulan/111 kali (capaian 100%).
- Jumlah pelaksanaan koordinasi Bidang Fispra dengan target 31 kali dan 4 OPD terealisasi 31 kali dan 4 OPD (capaian 100%).
- Jumlah pelaksanaan koordinasi Bidang Ekonomi dengan target 12 kali dan 12 OPD terealisasi 12 kali dan 12 OPD (capaian 100%).
- Jumlah pelaksanaan rakor dan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan sosialisasi SDGS dengan target 1 kali rakor, 1 kali sosialisasi dan 22 kali koordinasi terealisasi 1 kali rakor, 1 kali sosialisasi dan 22 kali koordinasi (capaian 100%).
- Jumlah pelaksanaan koordinasi Bidang Sosbud dengan target 34 kali dan 28 OPD terealisasi 34 kali dan 28 OPD (capaian 100%).

- Jumlah pelaksanaan koordinasi Bidang Litbang dengan target 6 kali terealisasi 6 kali (capaian 100%).
- Jumlah pelaksanaan koordinasi dana dekonsentrasi/tugas pembantuan dengan target 6 kali terealisasi 6 kali (capaian 100%).
- Jumlah koordinasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga dengan target 1 lembaga/NGO terealisasi 1 Lembaga/NGO (capaian 100%).
- Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelitbangan dengan target 1 kegiatan dan 1 dokumen terealisasi 1 kegiatan dan 1 dokumen (capaian 100%).

Dari 8 (delapan) Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas sub sektor di daerah melalui rapat koordinasi, asistensi program dan pelaksanaan kegiatan teralisasi 100,00% sehingga dikategorikan **Berhasil**.

Permasalahan dari sasaran ini adalah

- a. Dalam koordinasi pengusulan kegiatan DAK kurangnya data pendukung
- b. Sinkronisasi usulan daerah dengan pusat belum optimal

Solusinya antara lain :

- a. Koordinasi dengan OPD terus dilakukan dan pengambilan data langsung ke perangkat daerah
- b. Koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait sehingga usulan daerah dapat diakomodir.

### **SASARAN 3 :**

**Meningkatnya sistem dan prosedur pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan di daerah melalui pengembangan e-monev**

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan Sistem dan Prosedur Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan di Daerah melalui pengembangan E-Monev.

Sasaran ini dicapai melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :

- a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 188.050.000,- terealisasi sebesar Rp. 184.050.000,- (97,87%).

- b. Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah dengan anggaran sebesar Rp. 151.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 149.585.050,- (99,06%).

**Tabel. 4**

**Capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya sistem dan prosedur pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan di daerah melalui pengembangan e-monev**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	2019		Capaian (%)	Rencana 2019
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Monev Hasil Perencanaan Pembangunan daerah dan Monev AMPL yang dilaksanakan	kali	55	4	4	100	60
2	Jumlah dokumen evaluasi renja perangkat daerah	dokumen	16	4	4	100	20
<b>Rata-rata</b>						<b>100</b>	

Penjelasan Capaian Indikator Sebagai berikut :

- Jumlah Monev Hasil Perencanaan Pembangunan daerah dan Monev AMPL yang dilaksanakan dengan target 4 kali terealisasi 4 kali (capaian 100%).
- Jumlah dokumen evaluasi renja perangkat daerah dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen (capaian 100%).

Dari 2 (dua) Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Sistem dan Prosedur Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan di Daerah melalui pengembangan E-Monev teralisasi 100% sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Permasalahan dari sasaran ini adalah

- c. Kurangnya data monev (dokumen kontrak, progress fisik terupdate) dari OPD sehingga tidak dapat mengukur permasalahan di proyek
- d. Banyaknya OPD yang terlambat menyampaikan laporan evaluasi capaian kinerja

Solusinya antara lain :

- a. Koordinasi dengan OPD terkait data Monev
- b. Data evaluasi menggunakan data realisasi dari Badan Keuangan dan Aset

**SASARAN 4 :**

**Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil musyawarah pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif yang demokratis**

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil musyawarah pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif yang demokratis melalui Musrenbang tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Sasaran ini dicapai melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RKPD didukung dengan biaya sebesar Rp. 387.854.400,- terealisasi Rp. 387.534.350,- atau sebesar 99,92%

**Tabel. 5**

**Capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil musyawarah pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif yang demokratis**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	2019		Capaian (%)	Rencana 2019
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Kali	52	13	13	100	65
<b>Rata-rata</b>						<b>100</b>	

Penjelasan Capaian Indikator sebagai berikut :

Jumlah Musrenbang tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dilaksanakan sebanyak 13 kali dengan realisasi target sasaran 13 kali (sebesar 100%) sehingga berdasarkan Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil musyawarah pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif yang demokratis dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Permasalahan dari sasaran ini adalah

- e. Banyak usulan desa/kelurahan yang tidak sesuai dengan prioritas daerah
- f. Banyaknya usulan dari desa/kelurahan

Solusinya antara lain :

- a. Sebelum dilakukan pra dan Musrenbang Kecamatan terlebih dahulu dilakukan verifikasi usulan desa/kelurahan

- b. Penjelasan kepada masyarakat agar kegiatan yang diusulkan merupakan prioritas daerah dan mempunyai tingkat kemendesakan yang tinggi

## B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Terkait pengelolaan keuangan daerah, tingkat akuntabilitas dapat disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang memberikan informasi kinerja keuangan daerah berupa perbandingan antara anggaran dan realisasi keuangan dalam kurun waktu satu tahun.

Adapun kinerja keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran dengan rincian digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 7. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA BAPELITBANG</b>	<b>7.009.447.832</b>	<b>6.830.954.504</b>	<b>97,45</b>
I	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.805.333.832	1.763.473.999	97,68
	BELANJA PEGAWAI	1.805.333.832	1.763.473.999	97,68
II	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.204.114.000	5.067.480.505	97,37
	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	693.542.200	685.446.710	98,83
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.130.400	4.130.000	99,99
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air & Listrik	59.521.000	56.299.010	94,59
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	3.630.000	2.761.850	76,08
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	61.650.000	61.547.000	99,83
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.371.000	3.371.000	100
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.072.000	35.072.000	100
7	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	81.776.600	81.776.600	100
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.315.000	3.315.000	100
9	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	99.600.200	99.600.000	100
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	2.895.000	96,50
11	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	165.300.000	161.872.050	97,93

12	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	42.650.000	42.563.000	99,80
13	Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT	130.526.000	130.244.200	99,78
	<b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>	174.225.000	173.819.750	99,77
14	Pengadaan kendaraan dinas operasional	25.000.000	25.000.000	100
15	Pengadaan Meubeler	58.525.000	58.125.000	99,32
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8,500,000	8,500,000	100
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	76.800.000	76.794.750	99,99
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.000.000	3.000.000	100
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2,400,000	2,400,000	100,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	66.309.000	66.293.200	99,98
20	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM Aparatur	66.309.000	66.293.200	99,98
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	253.000.000	248.668.200	98,29
21	Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi, TP, Hibah Luar Negeri	75.000.000	70.970.850	94,63
22	Penyusunan Indikator Kinerja Utama	90.000.000	89.932.350	99,92
23	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	88.000.000	87.765.000	99,73
	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	197.959.000	187.655.300	94,80
24	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	197.959.000	187.655.300	94,80
	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	503.000.000	486.602.000	96,74
25	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	65.000.000	64.703.250	99,54
26	Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	95.000.000	87.111.850	91,70
27	Penyusunan & Pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	110,000,000	108.017.000	98,20
28	Fasilitasi kerjasama kelitbangan	233.000.000	226.769.900	97,33
	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>	75.000.000	71.118.100	94,82
29	Pendataan Potensi Daerah Perbatasan dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perbatasan	75.000.000	71.118.100	94,82
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	1.986.428.800	1.950.916.995	98,21
30	Penyusunan rancangan RPJMD	457.847.400	456.266.800	99,65
31	Penetapan RPJMD	193.700.000	192.136.900	99,19
32	Penyusunan rancangan RKPD	225.000.000	224.193.000	99,64
33	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	387.854.400	387.534.350	99,92
34	Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	188.050.000	184.050.000	97,87
35	Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	151.000.000	149.585.050	99,06
36	Penyusunan rancangan RKPD Perubahan	140.000.000	120.782.500	86,27
37	Pembentukan dan Fasilitasi E-Planning/ SIMDA Perencanaan	242.977.000	236.368.395	97,28

	<b><i>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</i></b>	475.000.000	419.024.750	88,22
38	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	120.000.000	112.733.850	93,94
39	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	280.000.000	231.357.000	82,63
40	Pendataan Bantuan Masyarakat Miskin	75.000.000	74.933.900	99,91
	<b><i>Program Perencanaan Sosial Budaya</i></b>	360.000.000	359.459.650	99,85
41	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	280.000.000	279.499.450	99,82
42	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	80.000.000	79.960.200	99,95
	<b><i>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</i></b>	419.650.000	418.475.850	99,72
43	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	319.650,000	318.580.350	99,67
44	Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya	100.000.000	99.895.500	99,90



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun ini merupakan media kinerja yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di Lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao. Media ini sangat penting sebagai umpan balik pengambilan keputusan bagi pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja berbagai sasaran program dan kegiatan tahun dalam Renstra Bapelitbang menunjukkan bahwa secara umum, presentase rencana pencapaian tingkat kinerja dari semua kegiatan/sasaran program sangat baik dengan angka capaian rata-rata 100%.

Keberhasilan tersebut merupakan wujud kesungguhan dan tanggungjawab aparatur dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi organisasi Bapelitbang. Belajar dari pengalaman maka kedepan perlu dilakukan berbagai upaya pembenahan agar lebih profesional dan akuntabel dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pembenahan tersebut antara lain menyangkut aspek koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi, sinergitas program/kegiatan antar sektor, manajemen keuangan, aspek kelembagaan, serta konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan dari program/kegiatan pembangunan sangat tergantung pada komitmen bersama antara Pejabat dan Aparatur Pemerintah yang didukung dengan etos kerja yang tinggi dan dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban, serta mampu melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kiranya LAKIP ini menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja sekaligus bahan kontribusi akuntabilitas kinerja daerah.

Baa, 24 Januari 2020  
Kepala Bapelitbang Kab. Rote Ndao,  
  
Drs. Erengki J. Haning  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750821199412 1006